

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan gagasan tertulis ini dalam Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis.

Gagasan Tertulis ini berjudul “Peranan Gender dalam Peningkatan Efektifitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Masyarakat Miskin Pada Konteks Pengembangan Masyarakat”. Adapun yang menjadi inti pembahasan berkaitan dengan judul ini yaitu identifikasi masyarakat miskin, fenomena kenaikan BBM, dan efektifitas Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penulisan gagasan tertulis ini tidak terlepas dari dukungan moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta rasa hormat yang teramat dalam, kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata, tim penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi masukan bagi seluruh *stakeholder* yang berkepentingan dan terkait dalam program pemerintah yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bogor, April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	2
BAB II PENDEKATAN TEORITIS	3
2.1 Definisi dan Konsep Miskin	3
2.2 Modal Sosial	4
2.3 Gender.....	4
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	5
3.1 Jenis Penelitian.....	5
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	5
3.4. Teknik Analisis Data	5
BAB IV ANALISIS DAN SINTESIS	6
4.1 Kemiskinan	6
4.1.1 Identifikasi Masyarakat Miskin	6
4.1.2 Kelembagaan Sosial, Modal Sosial, dan Kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Miskin	7
4.1.3 Fenomena Kenaikan Bahan Bakar Minyak dan Dampaknya Bagi Masyarakat Miskin.....	9
4.2 Bantuan Langsung Tunai	10
4.2.1 Pemantauan dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai.....	11
4.2.2 Peranan Gender dalam Peningkatan Efektivitas Bantuan Langsung Tunai.....	12
KESIMPULAN.....	15
SARAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA.....	17

RINGKASAN

Kesejahteraan sosial baik individu ataupun masyarakat merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan suatu bangsa dan merupakan suatu indikator keberhasilan pemerintahan. Peningkatan taraf hidup masyarakat adalah tujuan yang ingin dicapai pemerintah untuk menjadikan suatu bangsa yang mandiri dan kuat. Oleh karena itu terdapat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan sejak 2005 merupakan program jangka pendek yang bersifat sementara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program bertujuan untuk membantu rakyat miskin pada saat terjadinya kenaikan harga BBM. Oleh karena itu tujuan dari gagasan tertulis ini adalah untuk mengidentifikasi tolak ukur masyarakat yang tergolong dengan masyarakat miskin, mengetahui bagaimana pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin serta bagaimana keefektifan kebijakan serta sistem BLT sebagai program pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mengetahui bagaimana gender dapat menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari individu/ institusi/ yang melakukan penelitian terlebih dahulu daripada peneliti. Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan dan internet. Data sekunder tersebut didapatkan dengan menelusuri buku, artikel, skripsi dan laporan badan Pusat Statistik.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terdapat kenaikan penduduk miskin, yaitu 3,95 juta jiwa berdasar kenaikan jumlah kemiskina tahu 2005 ke 2006. Hal ini menyimpulkan bahwa butuh perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat miskin. Pemerintah merancang berbagai program penanggulangan kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, yaitu program kompensasi jangka pendek yang disebut program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adanya BLT bertujuan membangun rakyat untuk lebih maju. Melalui sistem dan mekanisme yang terencana dengan baik, serta mempertimbangkan aspek konteks sosial yang sudah ada di masyarakat sejak dahulu seperti modal sosial dan kelembagaan sosial. Hal ini terkait dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di pedesaan. Melalui pemahaman karakteristik masyarakat yang beragam dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merancang program yang tidak merusak tatanan nilai-nilai masyarakat dan menjadikan program tersebut berkelanjutan, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi pada tahun 2005 karena tingkat kenaikan harga BBM tergolong tinggi dibanding kenaikan-kenaikan harga sebelumnya, yaitu bensin: 87,5%, solar: 104,8%, dan minyak tanah: 185,7%. Adanya kenaikan harga BBM diambil dengan latar belakang diantaranya peningkatan harga BBM, yaitu mencapai di atas US\$ 120 per barel sehingga berakibat pada makin besarnya penyediaan dana subsidi yang dengan sendirinya makin membebani anggaran belanja negara. Jika tidak dilakukannya penyesuaian harga BBM dalam negeri, APBN yang merupakan salah satu pilar perekonomian menjadi tidak berkelanjutan. Hal ini akan menyebabkan runtuhnya kepercayaan pasar yang pada

gilirannya berakibat pada perekonomian nasional. Disamping itu, pemberian subsidi selama ini cenderung lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas. Sebanyak 20% masyarakat kelompok terkaya menikmati hampir 50% subsidi BBM atau energi yakni sebesar Rp 185 triliun dari Rp 265 triliun. Sementara 20% masyarakat termiskin hanya menikmati 5,15% subsidi BBM. Besarnya subsidi BBM mengakibatkan berbagai program untuk masyarakat miskin menjadi tidak mungkin dilaksanakan akibat terganggu. Penyebab lainnya yakni perbedaan harga yang besar antara dalam dan luar negeri memicu terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Oleh karenanya sejak tahun 2005, melalui instruksi presiden no 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin sebagai upaya menjaga daya beli bagi pemenuhan kebutuhan hidup.

Permasalahan yang timbul akibat adanya BLT tidak hanya mencakup aparat pemerintah, namun juga meliputi masyarakat miskin penerima BLT. Mayoritas penerima BLT adalah keluarga atau rumah tangga miskin. Namun di satu pihak masih banyak keluarga atau rumah tangga yang sama miskinnya dilaporkan tidak menjadi penerima. Sementara itu ditemukan justru beberapa rumah tangga yang tergolong mampu yang mendapatkannya. Ketidaktepatan sasaran ini menimbulkan ketegangan sosial baik yang berbentuk keluhan hingga demonstrasi. Ketegangan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya sosialisasi serta ketiadaan pedoman umum mengenai program yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan, pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin yang kurang terbuka dan mengikutsertakan masyarakat, dan petugas pendataan tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Oleh karena itulah terdapat kriteria dalam menjaring keluarga atau rumah tangga miskin, yaitu yang pertama pencacah meminta daftar keluarga atau rumah tangga miskin kepada ketua RT yang kemudian dilengkapi dengan daftar keluarga atau rumah tangga miskin dari sumber lain dan dilakukan observasi langsung ke masing-masing rumah untuk menilai layak tidaknya diajukan sebagai keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin. Kriteria yang kedua daftar yang sudah dinilai diserahkan kepada petugas BPS untuk dilakukan verifikasi secara kasat mata guna menentukan keluarga yang layak untuk di data sebagai keluarga atau rumah tangga miskin. Sedangkan pencacah menerima daftar keluarga atau rumah tangga layak di data yang kemudian dicacah dengan menggunakan formulir Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 Rumah Tangga (PSE05.RT).

Peranan gender dalam BLT bukan berarti membedakan wanita dan pria berdasarkan jenis kelamin tetapi lebih menekankan pada keadilan dalam pekerjaan dan kehidupan sosialnya. Pada umumnya wanita akan lebih berperan dalam pengaturan ekonomi keluarga khususnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makanan. Hal ini dikarenakan seorang wanita akan cenderung mengatur jumlah makanan dan jenis makanan yang akan disediakan pada hari tersebut dan hari selanjutnya sesuai dengan kondisi ekonomi dan jumlah anggota keluarga. Pemberian BLT yang sadar gender, akan membantu meminimalisir pemakaian uang BLT untuk hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Hal ini dikarenakan banyak warga penerima BLT yang kurang arif serta menjadi konsumtif dalam penggunaan uang BLT. Seperti yang terjadi di dua kecamatan

Kabupaten Klaten dimana diketahui pemberian BLT telah meningkatkan pendapatan rumah tangga petani Rp.90.792 per bulan atau 18,46 % dan menaikkan pengeluaran sebesar Rp.171.372 atau naik 35.15 % dibanding sebelum menerima BLT. Peningkatan konsumsi non pangan lebih besar dibanding peningkatan pangan. Melalui perbaikan sistem dan mekanisme penyaluran BLT yang lebih jelas dan terkontrol, hendaknya ada pemantauan yang lebih dalam dan spesifik terhadap masyarakat miskin. Pemantauan tersebut tidak hanya mengenai bentuk fisik rumah, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, namun juga perlu ditambahkan bahwa siapa yang lebih berperan dalam pengaturan perekonomian keluarga. Hal ini ditujukan sebagai pengawasan agar BLT tersebut sesuai dengan yang diharapkan yakni memberi bantuan langsung kepada masyarakat miskin sebagai upaya mengurangi beban kehidupan mereka.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang secara jumlah jauh dari kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut diiringi dengan pemenuhan kebutuhan mendesak yang dirasakan masyarakat miskin. Salah satu bentuknya yakni dengan pembangunan dapur umum karena beberapa wilayah banyak ternyata masyarakat yang tidak memiliki dapur. Dana pembangunan tersebut diambil dari sebagian dana Bantuan Langsung Tunai yang sebelumnya dilakukan pengkajian secara mendalam dan identifikasi kebutuhan terbesar masyarakat pada daerah tersebut. Contoh kongkretnya, yaitu melalui dapur umum sebagai program pengembangan masyarakat, akan dapat menumbuhkan tingkat kerjasama antar warga. Dapur umum yang dibangun secara partisipatif oleh masyarakat yang didukung pemerintah dapat dijadikan wadah bagi warga dalam bertukar informasi. Informasi tersebut dapat berguna baik pengembangan kemampuan dalam hal memasak dan rasa kekeluargaan sesama warga masyarakat. Pembangunan dapur umum yang di dalamnya terdapat pertukaran informasi seperti pembuatan masakan dan kue khususnya yang dilakukan oleh para Ibu, dapat memberikan inspirasi bagi para ibu untuk berwirausaha khususnya dalam bidang kuliner. Pada akhirnya kondisi tersebut dapat menunjang perekonomian keluarga dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akan terbentuk jaminan sosial yang berkelanjutan.